

**PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH BAGI WAJIB PAJAK
YANG MENGIKUTI PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY)
DI KOTA PEKANBARU**

TESIS

*Diajukan guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh gelar Magister
Kenotariatan pada Fakultas Hukum
Universitas Andalas*



Diajukan oleh :

**SADRI
1520123032**

Pembimbing :

1. Dr. SUHARIZAL, S.H.,M.H

2. SYOFIARTI, S.H.,M.Hum

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

**PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH BAGI WAJIB PAJAK YANG
MENGIKUTI PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX AMNESTY*) DI
KOTA PEKANBARU**

**SADRI
1520123032**

ABSTRAK

Dalam penyelenggaraan tugas negara untuk mencapai hidup sejahtera, negara membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai berbagai keperluan pembangunan, pemasukan dana yang di terima oleh negara diperoleh dari Dalam Negeri, antara lain diperoleh dari Pajak. Sebagai bentuk reformasi perpajakan salah satu agendanya adalah meluncurkan Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dengan harapan wajib pajak memanfaatkan fasilitas ini untuk kemudahan dan transparansi pelaporan pajak. Wajib pajak yang telah melaporkan hartanya akan mendapatkan kemudahan dalam pengalihan tanah dan/atau bangunan dimana wajib pajak akan mendapatkan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan. Maka dibutuhkanlah peran PPAT di dalam membantu Wajib Pajak untuk melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang belum dibalik nama atas nama Wajib Pajak, sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pengalihan hak atas tanah bagi Wajib Pajak yang telah mengikuti Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Kota Pekanbaru. Penelitian hukum menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat di lapangan. Dalam penulisan ini diperoleh data dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian di lapangan (*field research*) teknik pengumpulan data dilakukan studi dokumen dan wawancara. Sebelum dilakukan pengalihan hak atas tanah dan/bangunan wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak (*tax amnesty*) terlebih dahulu harus mengajukan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Setelah Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan diperoleh baru bisa dilakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat melalui Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Kata kunci : Pejabat Pembuat Akta Tanah, Wajib Pajak, Pengalihan Hak Atas Tanah, Tax Amnesty

**THE ROLE OF LAND DEED OFFICER IN THE TRANSFER OF
LAND RIGHTS FOR TAXPAYERS APPLYING FOR TAX
AMNESTY IN PEKANBARU CITY**

**SADRI
1520123032**

ABSTRACT

In carrying out the task of achieving prosperous life, the state needs a lot of funds to finance various development necessities. The state receives funds from domestic sources of income, including tax. One of the taxation reform agendas is the launching of the Tax Amnesty Program expected to enable taxpayers to make tax reports with ease and transparency. Taxpayers who have reported their wealth will be facilitated in the transfer of land/building and will get an income tax amnesty certificate. Therefore, the role of PPAT is needed in assisting taxpayers to transfer the right of land/building that has not yet been reversed in their name, as set forth in Article 15 of Law No. 11/2016 on Tax Amnesty. The problem discussed in this thesis is what is the role of the Land Deed Officer in the transfer of land rights for taxpayers applying for Tax Amnesty in Pekanbaru City. The research draws on empirical juridical approach, which is a study that uses approaches to the problem by looking at applicable legal norms associated with facts in the field. Data are obtained from library and field research. Data collection techniques are document study and interviews. Prior to the transfer of land/building rights, taxpayers applying for tax amnesty program must first submit an Income Tax Amnesty Certificate to the Tax Office with the conditions set forth in the Tax Amnesty Law. After the Income Tax Certificate is submitted, the transfer of land/building rights can be processed at the Office of the local National Land Agency through the Office of Land Deed Officer (PPAT).

Keywords: Land Deed Officer, Taxpayer, Transfer of Rights.